

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) dalam urbanisasi. Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal.

Dalam kurun waktu terakhir ini, pekerjaan sektor informal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat, terutama di daerah perkotaan. Akibat terbatasnya kesempatan kerja di luar pertanian di pedesaan maka arus migrasi desa-kota semakin meningkat, sedangkan sektor pertanian sendiri sudah mulai menurun kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja.

Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidak mampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja.

Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil.

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum.

Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh masyarakat menjadikan keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau.

Dengan demikian, merebaknya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan semata-mata karena keinginan para pedagang tadi untuk memperoleh pendapatan (*push factors*), tetapi lebih karena tuntutan pasar yang membutuhkan jasa Pedagang Kaki Lima (*pull factors*). Disamping itu jenis usaha ini juga memberikan dampak ikutan yang menguntungkan (*positive spillovers*) seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur ulang beberapa jenis sampah, serta menjadi alternatif terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai sisi positif, disamping sisi negatifnya. Hal ini merupakan

dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Di sisi lain, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan kesan kotor, kumuh dan tidak tertib terhadap lingkungan perkotaan yang tidak diinginkan oleh pemerintah kota dalam menata kotanya.

Berangkat dari permasalahan itulah pemerintah Kabupaten Bangkalan kemudian membangun tempat baru bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebelumnya tersebar di beberapa titik di kecamatan kota Bangkalan yang diberi nama Pusat Makanan Rakyat (PUMARA) Bangkalan dan dioperasikan tanggal 01 Juli 2009. PUMARA Bangkalan ini adalah tempat sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) dikabupaten Bangkalan setelah adanya penertiban oleh pihak pemerintah daerah (Satpol PP) dalam menjaga keindahan kota. Dengan direlokasinya para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut, maka permasalahan di pusat kota utamanya masalah ketertiban dan keindahan kota Bangkalan yang awalnya terlihat kumuh dan semrawut kini sudah mulai terlihat rapi dan secara garis besar permasalahan dapat teratasi.

Namun, dalam waktu dekat seiring dengan pemusatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut tidak semua menempati PUMARA Bangkalan, diantaranya banyak para pedagang yang tidak menempati PUMARA Bangkalan dan kembali pada tempat semula berjualan. berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan peneliti terhadap sebagian pedagang yang tidak mau menempati PUMARA Bangkalan yaitu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain;

1. Lokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang pada sebelum adanya pemusatan ke PUMARA Bangkalan, tempat berjualannya dekat dengan rumah masing-masing konsumen, sehingga mudah untuk diakses, namun setelah pemusatan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke PUMARA Bangkalan, kini lokasinya jauh sehingga kurang terakses oleh pelanggan dari masing-masing Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut.
2. Jatah tempat dari masing-masing Pedagang Kaki Lima (PKL) yang disediakan oleh pemerintah terlalu sempit, sehingga tempat berjualan antar pedagang harus berdempetan. Karena pada sebelumnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini bisa memanfaatkan tempat berjualan sesuai dengan kebutuhan, namun setelah relokasi ke PUMARA Bangkalan para pedagang harus menempati sesuai jatah dari pemerintah yaitu 1 m – 3 m persegi, padahal sebelumnya, diantara beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) harus membuka warungnya selebar 3 m – 6 m.

Berdasarkan fenomena tersebut pada intinya relokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) ke tempat Pusat Makanan Rakyat (PUMARA) Bangkalan yang terletak di Jl. Olahraga tersebut tidak menyelesaikan permasalahan, karena walaupun penataan kota sudah baik, namun menyisakan masalah di pihak para Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga hal ini menarik untuk diteliti, berdasarkan ulasan permasalahan diatas maka peneliti mengambil judul “ **ANALISIS EKONOMI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) KE PUMARA DI KABUPATEN BANGKALAN (Studi Kasus Pemusatan Para Pedagang Kaki Lima Dari Beberapa Titik Sekitar Kecamatan Kota Ke PUMARA Bangkalan)** ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke PUMARA Bangkalan terhadap jumlah pembeli para Pedagang Kaki Lima (PKL) ?
2. Bagaimana Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pumara di Kabupaten Bangkalan terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL)?
3. Apa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) setelah direlokasi ke PUMARA Bangkalan?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam Penelitian ini membahas para Pedagang Kaki Lima di PUMARA Bangkalan sebagai hasil relokasi dari beberapa titik di kecamatan kota, yang fokusnya terhadap perbedaan jumlah pembeli dan tingkat pendapatan Pedagang Kaki Lima antara sebelum dan sesudah relokasi ke PUMARA Bangkalan, dan juga membahas beberapa hambatan serta permasalahan para Pedagang Kaki Lima setelah ke PUMARA Bangkalan.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke PUMARA Bangkalan terhadap jumlah pembeli para Pedagang Kaki Lima
2. Untuk mengetahui Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pumara di Kabupaten Bangkalan terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima
3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) setelah direlokasi ke PUMARA Bangkalan

1.5. Mamfaat Penelitian

A. Untuk Peneliti

1. Peneliti dapat mengetahui dampak dari kebijakan relokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) ke PUMARA di kabupaten Bangkalan, baik dari sisi jumlah pembeli ataupun dari sisi jumlah pendapatan.
2. Dapat mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) setelah direlokasi ke PUMARA Bangkalan

B. Untuk Lembaga

1. Sebagai bahan acuan (Referensi) untuk penelitian yang lebih mendalam diwaktu yang akan datang.

C. Untuk Pemerintah

1. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan selanjutnya terkait dengan masalah yang terjadi pada saat merelokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL)